



## Peran Sektor Unggulan Terhadap Pengembangan Wilayah dan Transformasi Struktur Ekonomi di Provinsi Maluku Utara

### *The Role of Leading Sectors in Regional Development and Economic Structural Transformation in North Maluku Province*

**Fauziyah<sup>1</sup>, Siska<sup>2</sup>, Siti Maimunah<sup>3</sup>, Muhammad Abel<sup>4</sup>, Alief Rakhman Setyanto<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email:[fauziyahh1112@gmail.com](mailto:fauziyahh1112@gmail.com)<sup>1</sup>,[stmaimunah1905@gmail.com](mailto:stmaimunah1905@gmail.com)<sup>2</sup>,[Abelzmuhammad@gmail.com](mailto:Abelzmuhammad@gmail.com)<sup>3</sup>,[sisskaa1204@gmail.com](mailto:sisskaa1204@gmail.com)<sup>4</sup>, [aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id](mailto:aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id)<sup>5</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 23-11-2025

Revised : 24-11-2025

Accepted : 26-11-2025

Pulished : 28-11-2025

#### Abstract

*Regional development in North Maluku Province faces dynamic challenges amidst rapid economic growth driven by natural resource extraction. This study aims to identify leading economic sectors, analyze the transformation of the economic structure, and evaluate the role of these sectors in regional development. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data from the Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices over the last five years. The analytical tools utilized include Location Quotient (LQ) analysis to determine base sectors, Shift-Share Analysis to measure structural shifts and competitiveness, and Klassen Typology to map sectoral growth patterns. The findings indicate a structural transformation from the primary sector (agriculture and fisheries) to the secondary sector (mining and processing industry). These leading sectors play a significant role as engines of regional growth, although they pose challenges regarding development equity. The study recommends that local government policy should focus on strengthening inter-sectoral linkages to ensure that the benefits of leading sectors accelerate broader regional development.*

**Keywords:** *Leading Sectors, Economic Structure Transformation, Regional Development*

#### Abstrak

Pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara menghadapi tantangan yang dinamis di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh ekstraksi sumber daya alam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan, menganalisis transformasi struktur ekonomi, dan mengevaluasi peran sektor-sektor tersebut dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir. Alat analisis yang digunakan meliputi analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan sektor basis, Analisis Shift-Share untuk mengukur pergeseran struktural dan daya saing, serta Tipologi Klassen untuk memetakan pola pertumbuhan sektoral. Temuan penelitian menunjukkan adanya transformasi struktural dari sektor primer (pertanian dan perikanan) ke sektor sekunder (pertambangan dan industri pengolahan). Sektor-sektor unggulan ini memainkan peran penting sebagai mesin pertumbuhan daerah, meskipun menimbulkan tantangan terkait pemerataan pembangunan. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan pemerintah daerah berfokus pada penguatan keterkaitan antarsektor untuk memastikan bahwa manfaat sektor-sektor unggulan dapat mempercepat pembangunan daerah yang lebih luas.

**Kata Kunci:** *Sektor Unggulan, Transformasi Struktur Ekonomi, Pembangunan Daerah*



## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2017). Tujuan utama dari pengembangan wilayah bukan hanya sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga memastikan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang memperkuat ketahanan wilayah tersebut. Dalam konteks ini, identifikasi sektor unggulan (*leading sectors*) menjadi krusial karena sektor ini memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang mampu menarik pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Fenomena transformasi ekonomi di Provinsi Maluku Utara terlihat jelas melalui data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi perubahan drastis dalam komposisi penyumbang perekonomian daerah selama lima tahun terakhir. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dulunya mendominasi, kini tergeser oleh kinerja Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan yang melonjak akibat kebijakan hilirisasi nikel. Berikut adalah data distribusi persentase PDRB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha:

**Tabel 1. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 (Persen)**

Lapangan Usaha (Sektor)	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	22,50	20,10	18,40	15,20	12
Pertambangan & Penggalian	14,20	15,50	17,10	19,80	20
Industri Pengolahan	10,10	18,30	25,60	29,50	31
Sektor Lainnya	53,20	46,10	38,90	35,50	36
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, 2019-2023*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat tren penurunan kontribusi sektor primer (Pertanian) yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, sementara sektor sekunder (Industri Pengolahan dan Pertambangan) mengalami kenaikan eksponensial. Data ini mengonfirmasi terjadinya transformasi struktur ekonomi yang cepat (*leapfrog*) di Maluku Utara. Namun, data tersebut juga menyimpan potensi permasalahan. Pergeseran dominasi ke sektor industri padat modal (*capital intensive*) seperti pengolahan nikel dikhawatirkan tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor pertanian yang padat karya (*labor intensive*). Jika ketimpangan kontribusi ini terus melebar tanpa diimbangi penguatan sektor basis lainnya, Maluku Utara berisiko mengalami kerentanan ekonomi (*vulnerability*) apabila harga komoditas tambang global turun, serta potensi ketimpangan pendapatan antarwilayah yang memiliki tambang dengan yang tidak.(Ardiawan & Utama, 2024)

Pada kesenjangan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Sebagian besar penelitian terdahulu tentang Maluku Utara cenderung hanya berfokus pada dampak hilirisasi terhadap angka pertumbuhan makro atau dampak lingkungan semata. Masih sedikit literatur yang secara



komprehensif mengkombinasikan analisis potensi basis (*Location Quotient*), pergeseran struktur (*Shift-Share*), dan pola pertumbuhan (*Tipologi Klassen*) untuk mengevaluasi apakah "sektor unggulan" saat ini benar-benar mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan atau justru menciptakan disparitas struktur yang semu.(Nurjanah, 2025)

## Kajian Teoritis

### 1. Teori Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah merupakan upaya terencana untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Menurut Tarigan (2005), pengembangan wilayah bertujuan untuk menyerasikan laju pertumbuhan antar sektor dan antar wilayah sehingga tercipta pembangunan yang berimbang. Pertumbuhan ekonomi wilayah didefinisikan sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Arsyad, 2017).

Dalam perspektif ekonomi regional, pertumbuhan tidak hanya dilihat dari peningkatan *output* agregat semata, tetapi juga dimensi spasial dari distribusi pertumbuhan tersebut. Teori pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan) menekankan pentingnya akumulasi modal dan kemajuan teknologi dalam memacu pertumbuhan. Namun, dalam konteks wilayah berbasis sumber daya alam seperti Maluku Utara, teori ini diperkaya dengan Teori *Staple* (Watkins, 1963), yang menyatakan bahwa ekspor komoditas sumber daya alam (bahan mentah) dapat menjadi sektor utama (*leading sector*) yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*). Keberhasilan pengembangan wilayah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola *endowment factor* tersebut agar tidak terjebak pada ketergantungan semata, melainkan mampu menciptakan diversifikasi ekonomi.

### 2. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Landasan utama dalam menentukan sektor unggulan dalam penelitian ini mengacu pada *Economic Base Theory* yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) dan Douglass C. North. Inti dari teori ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Teori ini membagi kegiatan ekonomi menjadi dua sektor:

- Sektor Basis (*Basic Sector*):** Sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi ekspor (baik ke luar negeri maupun antar daerah). Sektor ini dianggap sebagai penggerak utama (*prime mover*) karena mendatangkan arus pendapatan dari luar wilayah. Peningkatan permintaan pada sektor basis akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian regional secara keseluruhan.
- Sektor Non-Basis (*Non-Basic Sector*):** Sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat lokal (residen). Pertumbuhannya bersifat *induced* (imbasan), artinya sangat bergantung pada kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor basis.

Dalam konteks penggunaan analisis *Location Quotient* (LQ) adalah derivasi metodologis dari teori ini untuk mengidentifikasi mana sektor yang surplus (basis) dan mana



yang defisit. Identifikasi ini krusial untuk melihat apakah dominasi sektor pertambangan di Maluku Utara benar-benar berfungsi sebagai basis yang efektif atau hanya menciptakan *enclave economy* (ekonomi kantong) yang minim dampak pengganda.

### 3. Teori Transformasi Struktural (*Structural Change Theory*)

Mengingat penelitian ini berfokus pada perubahan fundamental ekonomi daerah, teori transformasi struktural menjadi landasan analisis yang krusial. Teori yang dipopulerkan oleh Chenery dan Syrquin (1975) serta Kuznets ini menjelaskan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita suatu wilayah, secara alamiah akan terjadi transisi struktur ekonomi. Transisi ini ditandai dengan pergeseran dominasi kontribusi ekonomi dari sektor primer yang berbasis pertanian tradisional menuju sektor sekunder atau industri manufaktur, dan pada akhirnya akan berkembang menuju sektor tersier atau jasa. Perubahan komposisi ini tidak hanya mencerminkan angka statistik semata, melainkan perubahan mendasar dalam corak produksi masyarakat.

Proses transformasi tersebut terjadi akibat adanya interaksi simultan antara dua faktor utama, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, fenomena ini dijelaskan melalui Hukum Engel yang menyatakan bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan pangan akan menurun secara relatif, sementara permintaan terhadap barang-barang hasil industri dan jasa akan meningkat pesat. Sejalan dengan itu, dari sisi penawaran, perubahan struktur didorong oleh kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks spesifik Provinsi Maluku Utara, transformasi struktur ekonomi ini memiliki karakteristik yang unik karena tidak sepenuhnya berjalan secara evolusioner, melainkan didorong secara eksternal melalui investasi masif pada industri pengolahan nikel. Kondisi ini menyebabkan terjadinya "lompatan" struktur ekonomi yang signifikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah transformasi yang terjadi berdampak positif terhadap stabilitas wilayah atau justru menimbulkan kerentanan ekonomi baru.

### 4. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Untuk memperkuat variabel "Pengembangan Wilayah", teori Francois Perroux (1955) tentang Kutub Pertumbuhan sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama; pertumbuhan muncul di titik-titik atau kutub pertumbuhan (*growth poles*) dengan intensitas yang berbeda, kemudian menyebar melalui saluran yang berbeda.

Kutub pertumbuhan biasanya berupa industri kunci (*key industry*) yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain. Dalam kasus Maluku Utara, kawasan industri pertambangan bertindak sebagai kutub pertumbuhan. Penelitian ini akan melihat apakah kutub pertumbuhan tersebut menciptakan efek sebar (*spread effect*) yang positif bagi wilayah sekitarnya (pemerataan), atau justru menimbulkan efek sedot (*backwash effect*) yang merugikan wilayah pinggiran (ketimpangan).



## Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder berupa deret berkala Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan, yang kemudian diolah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk membedah struktur ekonomi wilayah. Proses analisis dilakukan secara bertahap menggunakan tiga alat analisis utama, yaitu *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis yang berorientasi ekspor, analisis *Shift-Share* untuk mengukur pergeseran struktur ekonomi serta kinerja sektoral dibandingkan tingkat nasional, dan Tipologi Klassen untuk memetakan klasifikasi pertumbuhan sektor ke dalam empat kuadran. Integrasi dari ketiga hasil analisis tersebut akan menghasilkan identifikasi sektor unggulan yang akurat dan gambaran nyata mengenai transformasi struktur ekonomi yang sedang berlangsung, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam merumuskan strategi kebijakan pengembangan wilayah yang adaptif guna menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur fenomena ekonomi secara objektif menggunakan data numerik, sedangkan sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris mengenai kondisi struktur ekonomi, sektor unggulan, dan pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tanpa bermaksud memanipulasi variabel (Sugiyono, 2018). Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja sektor-sektor ekonomi untuk menjawab rumusan masalah mengenai transformasi struktur dan pengembangan wilayah.

### Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi data, maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Provinsi Maluku Utara.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Nilai PDRB yang dinilai berdasarkan harga tahun dasar (2010) untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil dengan mengabaikan faktor inflasi.
3. Sektor Unggulan: Sektor ekonomi yang memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dan memiliki keunggulan komparatif serta kompetitif.
4. Transformasi Struktur Ekonomi: Perubahan komposisi kontribusi sektor ekonomi dari sektor primer menuju sekunder dan tersier yang dilihat dari persentase distribusi PDRB.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) selama periode 5 tahun terakhir (misalnya: 2019–2023). Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara dan BPS Nasional. Data spesifik yang dikumpulkan meliputi:



1. PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha (sebagai variabel pembanding/referensi).

### **Metode Analisis Data**

Untuk menjawab tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan tiga alat analisis utama:

#### Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan non-basis dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Sektor basis adalah sektor yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan mengekspor ke luar wilayah. Rumus LQ adalah sebagai berikut (Arsyad, 2017):

$$LQ = \frac{U_1}{V_1} / \frac{U_1}{V_1}$$

Keterangan:

$v_1$  = Nilai PDRB sektor i di Provinsi Maluku Utara.

$U_1$  = Total PDRB Provinsi Maluku Utara.

$V$  = Nilai PDB sektor i di Indonesia (Nasional).

$V$  = Total PDB Indonesia (Nasional).

Kriteria Pengukuran:

$LQ > 1$ : Sektor Basis (Unggulan/Kompetitif).

$LQ < 1$ : Sektor Non-Basis (Belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri).

$LQ = 1$ : Sektor mencukupi kebutuhan wilayah (swasembada).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi Sektor Basis dan Non-Basis (Analisis *Location Quotient*)**

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara selama periode pengamatan, teridentifikasi adanya pergeseran fundamental dalam peta sektor basis ekonomi daerah. Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Industri Pengolahan secara konsisten menunjukkan nilai  $LQ > 1$  dengan tren yang terus meningkat. Tingginya nilai LQ pada kedua sektor ini mengindikasikan bahwa komoditas nikel dan produk turunannya telah menjadi komoditas ekspor utama yang melayani permintaan pasar luar wilayah, baik nasional maupun internasional. Hal ini mengonfirmasi bahwa Maluku Utara memiliki keunggulan komparatif yang absolut dalam kekayaan sumber daya mineral dibandingkan rata-rata wilayah lain di Indonesia.(Pratiwi, 2024)

Sebaliknya, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang secara historis merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat, kini menunjukkan tren nilai LQ yang stagnan bahkan cenderung menurun mendekati angka 1 atau di bawahnya pada sub-sektor tertentu. (Jumiyanti, 2018), Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih mampu memenuhi kebutuhan internal wilayah, peranannya sebagai penyumbang surplus eksport mulai



tergerus oleh dominasi sektor ekstraktif. Penurunan derajat basis pada sektor pertanian ini menjadi sinyal awal adanya gejala *Dutch Disease*, di mana booming pada sektor sumber daya alam (tambang) menyebabkan sektor yang dapat diperdagangkan lainnya (pertanian) menjadi kurang kompetitif.

## 2. Pergeseran Struktur Ekonomi dan Daya Saing Wilayah (Analisis *Shift-Share*)

Analisis *Shift-Share* memberikan gambaran mendalam mengenai komponen pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dipecah menjadi pengaruh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen *Differential Shift* (Keunggulan Kompetitif) pada Sektor Industri Pengolahan bernilai positif sangat besar. Artinya, pertumbuhan sektor industri di Maluku Utara jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa transformasi struktur ekonomi yang terjadi bukan semata-mata karena tren global, melainkan karena adanya faktor lokasional spesifik seperti kebijakan hilirisasi dan cadangan deposit nikel yang memberikan daya saing tinggi bagi wilayah ini.(Abidin, 2015)

Namun, hasil analisis *Shift-Share* juga memperlihatkan adanya nilai negatif pada komponen *Proportional Shift* (Bauran Industri) untuk beberapa sektor tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut tumbuh lambat di tingkat nasional dan imbasnya juga dirasakan di daerah. Pergeseran struktur ekonomi terlihat nyata dari dominasi kontribusi sektor primer yang berpindah ke sektor sekunder. Transformasi ini bersifat "lompatan" (*leapfrog*) karena Maluku Utara melompat dari ekonomi agraris langsung menuju industrialisasi padat modal tanpa melalui fase industrialisasi padat karya yang matang, yang berimplikasi pada pola penyerapan tenaga kerja yang tidak linear dengan pertumbuhan PDRB.

## 3. Pemetaan Pola Pertumbuhan Sektor Ekonomi (Analisis Tipologi Klassen)

Melalui pemetaan Tipologi Klassen, sektor-sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara terpolarisasi ke dalam kuadran yang kontras. Kuadran I (Sektor Maju dan Tumbuh Pesat) secara mutlak ditempati oleh Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Kedua sektor ini menjadi *prime mover* pembangunan dengan laju pertumbuhan yang fantastis dan kontribusi PDRB yang dominan. Posisi ini menegaskan bahwa "kue ekonomi" Maluku Utara saat ini sangat bergantung pada kinerja korporasi-korporasi besar yang bergerak di dua sektor tersebut.(Salakory & Matulessy, 2020)

Sementara itu, Sektor Pertanian dan Perikanan cenderung berada pada posisi Kuadran II (Sektor Maju tapi Tertekan) atau bergeser ke Kuadran III (Sektor Potensial). Sektor ini masih memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB (secara nominal), namun laju pertumbuhannya jauh di bawah rata-rata pertumbuhan daerah yang didongkrak oleh tambang. Kondisi ini mengkhawatirkan karena sektor yang "tertekan" ini justru merupakan sektor yang menampung jumlah tenaga kerja terbesar di Maluku Utara. Disparitas posisi kuadran ini menunjukkan adanya ketimpangan sektoral yang tajam, di mana sektor yang tumbuh pesat (tambang) bersifat padat modal, sedangkan sektor yang tumbuh lambat (pertanian) bersifat padat karya.



#### 4. Implikasi Sektor Unggulan Terhadap Pengembangan Wilayah

Peran sektor unggulan (Tambang dan Industri) terhadap pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki dampak ganda (*dual effect*). Di satu sisi, sektor ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi agregat yang tinggi dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak, yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur publik. Kawasan industri seperti di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan telah berfungsi sebagai "Kutub Pertumbuhan" (*Growth Pole*) baru yang memicu perkembangan infrastruktur fisik, transportasi, dan jasa pendukung di sekitar kawasan lingkar tambang.(Kembauw et al., 2015)

Pada tantangan pemerataan pembangunan menjadi isu krusial. Transformasi struktur ekonomi yang terlalu cepat menciptakan risiko *enclave economy*, di mana kekayaan yang dihasilkan berputar di lingkaran industri dan tidak menetes (*trickle down effect*) secara optimal ke sektor ekonomi kerakyatan lainnya. Pengembangan wilayah ke depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan nilai PDRB yang tinggi, melainkan harus fokus pada penciptaan keterkaitan (*linkage*) antara sektor industri unggulan dengan sektor pertanian lokal, misalnya melalui penyediaan pangan bagi kawasan industri yang disuplai oleh petani lokal, guna menjamin keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi wilayah.(Syamsiyah & Kurnia, 2017).

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil identifikasi sektor basis menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), terbukti bahwa Provinsi Maluku Utara telah mengalami perubahan fundamental pada tulang punggung ekonominya. Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan kini secara konsisten menjadi sektor basis utama dengan nilai  $LQ > 1$ , menggantikan peran Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang daya saingnya semakin stagnan. Hal ini menegaskan bahwa orientasi ekonomi wilayah telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan pangan lokal menuju pemenuhan permintaan ekspor komoditas global berupa nikel dan produk turunannya.

Analisis *Shift-Share* memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi yang terjadi bersifat "lompatan" (*leapfrog*) dari agraris langsung menuju industrialisasi padat modal. Sektor Industri Pengolahan memiliki keunggulan kompetitif (*Differential Shift*) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang didorong oleh kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Namun, transformasi yang terlalu cepat ini menyisakan celah pada struktur ekonomi, di mana sektor-sektor tradisional tumbuh melambat karena minimnya efek imbasan dari sektor industri yang tumbuh sangat agresif.

Hasil pemetaan Tipologi Klassen memperlihatkan adanya polarisasi kinerja sektor yang tajam. Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan menempati posisi Kuadran I (Sektor Maju dan Tumbuh Pesat) sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi daerah. Sebaliknya, Sektor Pertanian yang menampung mayoritas tenaga kerja lokal justru tertekan di Kuadran II atau III. Ketimpangan posisi kuadran ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Maluku Utara belum diikuti oleh pemerataan kinerja antar-sektor, menciptakan jurang produktivitas antara sektor modern dan sektor tradisional.

Secara keseluruhan implikasi dari dominasi sektor unggulan ini terhadap pengembangan wilayah memberikan dampak ganda. Di satu sisi, muncul kutub-kutub pertumbuhan baru di



kawasan industri yang meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara drastis. Namun di sisi lain, fenomena ini memicu risiko *enclave economy* (ekonomi kantong), di mana perputaran uang terkonsentrasi di kawasan lingkar tambang dan tidak menetes (*trickle down*) secara optimal ke wilayah pedesaan lainnya, sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan jika sumber daya alam tersebut habis di masa depan.

## Saran

1. Hilirisasi Pangan Lokal: Mewajibkan perusahaan tambang untuk menyerap hasil pertanian dan perikanan lokal guna kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan pasar pasti bagi petani.
2. Reinvestasi Dana Bagi Hasil (DBH): Mengalokasikan pendapatan pajak tambang secara khusus untuk modernisasi teknologi pertanian agar produktivitas sektor padat karya meningkat.
3. Peningkatan *Skill* Lokal: Menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi daerah dengan kebutuhan spesifik industri smelter agar tenaga kerja lokal dapat mengisi posisi teknis.
4. Diversifikasi Ekonomi: Mulai mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai "sabuk pengaman" ekonomi jangka panjang untuk mengantisipasi masa pasca-tambang.

## DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2015). Aplikasi Analisis Shift Share pada Transformasi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Wilayah di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Informatika Pertaian*, 24(2), 165–178.
- Ardiawan, S. K. A., & Utama, M. S. (2024). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Journal Of Business, Finance, And Economics (Jbfe)*, 5(1), 172–198.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chenery, H. B., & Syrquin, M. (1975). *Patterns of Development, 1950–1970*. London: Oxford University Press.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread*. New Haven: Yale University Press.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de 'pole de croissance' (Note on the concept of growth poles). *Économie appliquée*, 8, 307-320.
- Watkins, M. H. (1963). A Staple Theory of Economic Growth. *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(2), 141–158.
- Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis location quotient dalam penentuan sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29–43.
- Kembauw, E., Sahusilawane, A. M., & Sinay, L. J. (2015). Sektor pertanian merupakan sektor unggulan terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Maluku. *Agriekonomika*, 4(2), 210–220.
- Nurjanah, F. S. (2025). *Tingkat Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sulawesi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Tahun 2019-2023)*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratiwi, R. (2024). Analisis Location Quotient (Lq) Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan*



*Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 10(2), 140–146.*

Salakory, H. S. M., & Matulessy, F. S. (2020). Analisis shift-share terhadap perekonomian Kota Sorong. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 14(4)*, 575–586.

Syamsiyah, N., & Kurnia, G. (2017). Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift–Share Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Agribisnis Terpadu, 10(2)*, 201–2011.